

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERBANKAN SYARIAH
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS KELURAHAN BALANDAI KOTA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Oleh

RINO

NIM 15.04.02.0138

Di bimbing Oleh

**Burhan Rifuddin, SE., MM
Muzayyanah Jabani, ST.,M.M.**

Diuji Oleh

**Dr. Takdir, SH., MH.
Irma T, S.KOM., M.KOM.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERBANKAN SYARIAH
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS KELURAHAN BALANDAI KOTA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Di ajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (**SE**)

Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

RINO

NIM 15.04.02.0138

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Rino

Nim : 15.04.02.0138

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 04 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,

Rino

NIM 15.04.02.0138

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **“Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah
Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
(Studi Kasus Kelurahan Balandai Kota Palopo) “**

Nama : Rino

NIM : 15.0402.0138

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Di setujui untuk diujikan pada ujian seminar hasil. Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 04 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Burhan Rifuddin, SE., MM.
NIP 19670311 199803 1 001

Muzayyanah Jabani, ST.,M.M.
NIP 19750104 200501 2 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi Rino

Palopo, 04 Juli 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Rino
NIM	: 15.04.02.0138
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Balandai Kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian Seminar Hasil.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Burhan Rifuddin, SE., MM.
NIP19670311 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi Rino

Palopo, 04 Juli 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Rino
NIM	: 15.04.02.0138
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Balandai Kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian Seminar Hasil.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Muzayyanah Jabani, ST., M.M.
NIP 19750104 200501 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعٍ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Balandi Kota Palopo)”** dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Salawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. Keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya semoga mendapat syafaat nantinya diakhir zaman. Nabi yang diutus Allah swt. Sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Yunus P dan Ibunda Nurhayati, Adik dan kakak ku, keluargaku dan annisa fitri iriani, yang senantiasa memanjatkan doa memohonkan keselamatan dan kesuksesan buat penulis. Begitu

banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, S.H, M.H. Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr.Muhaemin M.A.yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan I Dr. Ruslan Abdullah, S.El., MA. Wakil Dekan II, Dr. Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan III. Dr. Takdir, SH., M.H. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Hendra Safri, M.M. dan Burhan Rifuddin, SE., MM. dan Muzayyanah Jabani, ST., M.M. yang masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.

4. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada sang motivator saya selama menulis skripsi, Erwin, SE yang selalu ada dalam suka dan duka untuk penulis makasih untuk semua bantuannya.
6. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kohati yang selalu memberikan Doa semangat dan ide dalam rangka membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu selama ini membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, pada akhirnya ucapan terimakasih yang paling mendalam peneliti ucapkan semoga segala bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah disisi Allah swt.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, 26 Juni 2019

Rino

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
PERSETUJUAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL	xv
ABSTRAK	xvi
PRAKATA	xvii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Kajian Pustaka	13
1. Pengertian Perbankan Syariah	7
2. Sejarah Perbankan Syariah	14

3. Dual Banking System	20
4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	22
5. Struktur Organisasi	24
6. Produk Bank Syariah	25
7. Produk Jasa Bank Syariah	30
8. Kegiatan Perbankan Syariah.....	32
9. Ekonomi Masyarakat	41
10. Ciri-ciri Ekonomi Masyarakat	44
11. Bentuk-bentuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat.....	44
C. Kerangka Berfikir	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN49

A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Informan Penelitian	50
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....53

A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian	51
1. Eksistensi Perbankan Syariah di Kelurahan Balandai Kota Palopo	56
2. Eksistensi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kelurahan Balandai	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	48

ABSTRAK

Nama : Rino
NIM : 15.0402.0138
Judul : Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah
Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi
Kasus Kelurahan Balandai Kota Palopo)

Permasalahan dalam penelitian ini yakni kurangnya minat masyarakat Kelurahan Balandai menggunakan jasa Bank syariah. Adapun menurut peneliti penyebab dari kurangnya minat masyarakat Balandai menggunakan bank syariah karena bank syariah kurang dikenal di kalangan masyarakat Balandai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang bank syariah di Kelurahan Balandai dan bank syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Balandai.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang di peroleh melalui wawancara langsung dengan informan penelitian. Data diolah dan di analisis menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pemahaman Masyarakat Tentang Bank Syariah Di Kelurahan Balandai Kota Palopo masih kurang diketahui oleh masyarakat. karena pihak bank syariah kurang melakukan sosialisasi sehingga masyarakat kurang paham tentang Bank Syariah yang ada di Kota Palopo. (2) Pemahaman tentang Bank Syariah di kalangan pelaku usaha maupun wirausaha yang ada di Kelurahan Balandai dianggap kurang memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat Kelurahan Balandai. Pelaku usaha cenderung menggunakan jasa bank konvensional dalam melakukan pengembangan usaha melalui pengambilan kredit atau pinjaman di bank konvensional.

Implikasi dari penelitian ini yakni dengan merujuk pada hasil penelitian ini, sebaiknya praktisi bank syariah melakukan sosialisasi secara maksimal di setiap wilayah yang ada di Kota Palopo terkait bank syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah menjadi penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*Surplus*) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit*). Selain itu, bank syariah memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Meskipun bank syariah memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, namun permasalahan pokok yang dialami bank syariah yaitu rendahnya *market share* atau pangsa pasar. Permasalahan pangsa pasar merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum bisa diatasi secara maksimal oleh akademisi maupun praktisi bank syariah. Berbagai cara untuk meningkatkan pangsa pasar bank syariah sudah dilakukan namun belum mampu menyaingi atau menyamai pangsa pasar bank konvensional. Pemecahan masalah pangsa pasar bank syariah memerlukan proses dan waktu yang lama.

Salah satu penyebab permasalahan rendahnya pangsa pasar bank syariah yaitu rendahnya penggunaan jasa layanan di bank syariah. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor diantaranya kualitas layanan bank

syariah, promosi dan pemahaman agama masyarakat.¹ Rendahnya eksistensi bank syariah di kalangan masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya pangsa pasar bank syariah.

Asumsi ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian seperti temuan dari Nikmah Zahrotun yang mengatakan bahwa dimensi religiousitas atau pemahaman agama memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan jasa bank syariah.² Dari asumsi tersebut dapat dipahami bahwa tingkat pemahaman agama masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab penggunaan jasa layanan bank syariah. Sehingga demikian, tingkat pemahaman agama menjadi hal yang penting dalam mendorong minat masyarakat menggunakan bank syariah.

Kelurahan Balandai merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Palopo yang memiliki jumlah penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Namun, berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada observasi awal ditemukan permasalahan kurangnya minat masyarakat Kelurahan Balandai menggunakan jasa Bank syariah. Adapun menurut peneliti penyebab dari kurangnya minat masyarakat Balandai menggunakan bank syariah karena bank syariah kurang dikenal di kalangan masyarakat Balandai .

Bank syariah mempunyai banyak keunggulan karena tidak hanya berdasarkan pada syariah saja sehingga transaksi dan aktifitasnya menjadi halal, tetapi sifatnya yang terbuka dan tidak mengkhususkan diri dari nasabah muslim

¹Rahmanto Hanif. *Pengaruh Promosi, Kualitas Layanan, Dan Pemahaman Agama Terhadap Minat Masyarakat Desa Sraten Kab.Semarang Untuk Menabung Di Bank Syariah* .Dalam Jurnal Ekonomi Vol 1 Nomor 2 Tahun 2017, h. 21

²Nikmah Zahrotun. *Pengaruh Dimensi Religiusitas Masyarakat Santri Desa Kajen Kecamatan Margoyos Kabupaten Pati Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus Pada BprsArtha Mas Abadi)* Dalam Jurnal Iain Walisongo Tahun 2013, h. 12

saja tetapi juga bagi non muslim. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah membuka peluang yang sama terhadap semua nasabah dan tidak membedakan nasabah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoprasikannya di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan di temukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, istishna, dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan bank konvensional. Sebagai sesuatu yang tergolong baru, keberadaan bank syariah dan produk-produknya tentu akan menjadi suatu pilihan yang mungkin diminati dan mungkin juga tidak. Firman Allah Swt. Dalam surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu.

³Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahan*. h.123

Pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di antaranya dapat diwakili dengan pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kesan umum yang ditangkap masyarakat tentang perbankan syariah adalah (1) perbankan syariah identik dengan sistem bagi hasil, (2) perbankan syariah adalah bank Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, akibat yang ditimbulkan dari kurangnya sosialisasi yaitu Pemahaman masyarakat tentang bank syariah di Kelurahan Balandai Kota Palopo semakin tidak dikenal oleh masyarakat. Jika masalah ini tidak ditangani dengan cepat oleh bank syariah maka pandangan masyarakat akan semakin terpuruk. Dengan adanya isu negatif tersebut maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemahaman Masyarakat tentang Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Balandai Kota Palopo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang bank syariah di kelurahan balandai kota palopo?
2. Bagaimana bank syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan balandai kota palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang bank syariah masyarakat di Kelurahan Balandai Kota Palopo
2. Untuk mengetahui bank syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kelurahan Balandai Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kalangan akademik maupun masyarakat secara umum dalam rangka menambah wawasan intelektual khususnya yang menyangkut dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kelurahan balandai kota palopo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi suatu bahan renungan dan intropeksi diri dalam kehidupan sehari-hari khususnya bank syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kelurahan balandai kota palopo.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Dari variable di atas, penulisan mencoba memberikan devenisi terhadap variable tersebut untuk menghindari penafsiran yang berbeda;

1. Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip syariat Islam. Sesuai dengan prinsip Islam melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Indikator Perbankan Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kegiatan usaha, prinsip usaha dan sistem operasional bank syariah.

2. Ekonomi Masyarakat yaitu sistem pengelolaan sumber daya yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. ekonomi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengembangan aset manusia, pengembangan aset modal dan pengembangan aset sosial masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dimaksud adalah untuk mendapatkan tentang posisi penelitian ini dengan kaitannya dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh kalangan akademis. Hal ini ditempuh guna menghindari kesamaan objek penelitian dan untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada.

1. Moh. Indra Banhsawan (2017) “Ekistensi Ekonomi Islam” berdasarkan data hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbankan memiliki peran penting dalam membangun dan menunjang ekonomi Negara, terutama setelah diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan ekonomi Islam di Indonesia saat ini sudah mulai dikenal dan disetujui oleh masyarakat⁴.
2. Irsaldi (2018) “Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonmian Masyarakat Kota Palpo Kecamatan Bara” Berdsasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan perbankan syariah di kota palopo atas dasar melihat kondisi yang membutuhkan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam dalam pelaksanaan operasionalnya⁵.

⁴Moh. Indra Bangsawan, *Eksistensi Ekoomi Islam (Studi Tentang Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

⁵Irsaldi, *Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonmian Masyarakat Kota Palpo Kecamatan Bara*, Skripsi IAIN Palopo, 2018

3. Indriani Suleha (2014) “Peran Bank Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Syariah” berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa peran bank syariah dalam mengembangkan sektor nill dalam upaya memajukan ekonomi yang berkeadilan, merata, jauh dari jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin.⁶

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Perbankan syariah dalam peristilaan internasional dikenal sebagai *Islamic banking* atau juga disebut dengan *intersest-free banking*. Peristilaan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah dikembangkan sebagai satu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilakukan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Bank Islam atau selanjutnya disebut juga dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadist Nabi saw. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

⁶Indriani Suleha, *Peran Bank Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Syariah*, Skripsi STAIN Palopo, 2014

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan prinsip syariah Islam.⁷ Antonio dan perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.⁸ Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadist; sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan Islam, adalah memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen pangsa pasar perbankan syariah dan menjalani hubungan kerja sama dengan para ulama karena bagaimana kemampuan para ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan kehidupan umat Islam.

⁷Muhammad, *Manajemen dana bank syariah –ed 1, - 1, -cet 2.- Jakarta: rajawali pers, 2*

⁸Antonio dan perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta:PT dana bakhti Wakaf , 1997), h.1 .

Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditor dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.⁹

a. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Membahas persoalan bank syariah, pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam Islam. Sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari persoalan uang. Di dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas. Di terimanya peran uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi tukar menukar. Sebagai alat tukar menukar, peranan uang sangat dibenarkan, namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan, didalam ekonomi tukar menukar uang digolongkan sebagai riba *al-fadl*.¹⁰ Oleh karena itu, dalam Islam uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian, bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang (apabila memberatkan ekspolitas).

Diakui atau tidak, bahwa deregulasi financial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syariah, yaitu: BPR syariah dana mardotilla; BPR syariah berkah amal sejahterah, keduanya berada di Bandung pada tahun 1992

⁹ Muhammad, M.Ag., *Manajemen Bank Syariah*, (edisi pertama, September 2002), h. 15.

¹⁰ Zainil Arifin, Mba, *Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah*, (Diterbitkan Oleh Alvbel-Anggota Ikapi Komlek TNI-AU Triloka, Jl Trilokal 1 No. 18, Pancoran, Jakarta; 2002); h. 7.

diundangkannya UU RI perbankan No 7 tahun 1992, yaitu isinya tentang bank bagi hasil. Saat itu sudah berdiri bank muamalat Indonesia. Kemudian diikuti oleh BPR bank syariah bangun derajat warga dan BPR syariah margi rizki bahagia, keduanya berada di Yogyakarta. Reaksi berikutnya juga muncul, untuk melakukan revisi UU RI Nomor 7 tahun 1992 menjadi UU RI Nomor 10 tahun 1998 dengan demikian diterbitkan UU RI Nomor 10 tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi perbankan nasional dimana pemerintah membuka lembar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Setelah UU RI Nomor 10 tahun 1998 di Indonesia telah berdiri; satu bank umum syariah (bank muamalat Indonesia) ditambah dengan 80 BPR syariah.¹¹

Kalau dilihat secara makro ekonomi, perkembangan bank syariah di Indonesia, memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. UU RI Nomor 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk menumbuhkan bank syariah di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama apabila terjalin hubungan kerja sama di antara bank-bank syariah.¹²

Adanya UU RI Nomor 10 tahun 1998 dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan syariah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang berkerja pada prinsip syariah akan menambah

¹¹Muhammad, *Manajemen Dana bank Syariah*, UPP STIM Ikut Mencerdaskan Bangsa, edisi revisi Kedua maret 2011, h. 20.

¹²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syaria*. h. 16.

semarak lembaga keuangan syariah yang ada di sisi seperti: bank umum syariah, BPR syariah, dan baitul mall wattamwil (BMT). Kegiatan operasional perbankan syariah dimulai pada tahun 1992 melalui PT bank muamalat Indonesia atau empat tahun setelah deregulasi paceo 88. Perkembangan perbankan syariah berjalan lebih lambat di banding dengan bank konvensional.

b. Karakteristik bank syariah

Prinsip bank syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus di manfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktifitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dan pengusaha yang memerlukan dana (pengolaan dana). Salah satu bentuk lembaga perantaraan tersebut adalah bank-bank yang kegiatan usahanya berdasarakan prinsip syariah.

Bank syariah ialah bank yang berdasarkan, antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparasi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain, sebagai berikut.¹³

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk;
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money);

¹³ Ikatan akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2002), h.. 1-2.

3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulasi;
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga dari suatu barang; dan
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun pembebanan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang di haramkan. Berbeda dengan bank non- syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi – transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Di samping itu, Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh *imbalan* atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syariat berikut ini:

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman;
2. Bukan riba;
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
4. Tidak ada penipuan (*gharar*);
5. Tidak mengandung materi-materi yang di haramkan ; dan
6. Tidak mengandung unsur judi (*maisyrir*).

Dalam operasiional bank syariah perlu memperhatikan hal-hal yang diatur oleh syariah atau ajaran Islam berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya:

1. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

a. Prinsip Simpan Murni (al-Wadiah)

Prinsip simpan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak dan kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk *al-Wadiah*. Fasilitas al-Wadiah biasanya diberikan untuk tujuan investasi guna untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional identik dengan giro.

b. Bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyediaan dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

c. Prinsip jual beli (at-tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan

atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga jual beli ditambah keuntungan (*margin*).

d. Prinsip fee/jasa (*al- ajr walimullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non- pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk Produk yang berdasarkan prinsip ini antara bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain secara syariah prinsip ini di dasarkan pada konsep *al ajr walimullah*.

2. Sejarah Perbankan Syariah

a) Asal Mula Perbaikan Perbankan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah padasaman kerajaan dulu di ternate Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan amerika dibawah oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke Negara jajahan baik di Asia, afrika maupun benua afrika.

Jika kita telusuri sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, dalam perkembangan sejarah tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan nama faluta asing (*money changer*).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya operasional bank berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sampai sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah denagn kegiatan

peminjaman uang. Uang yang disimpan masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan berkembang, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada dinegara maju maupun negara berkembang. Bahkan dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan moderen, perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara.¹⁴

b) Sejarah Perbankan

Seiring dengan perkembangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karna perkembangan dunia, perbankan tidak terlepas dari dunia perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daerah Eropa akhirnya menyebar ke Asia barat. Bank-bank yang sudah dikenal pada saat itu di benua Eropa adalah bank venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank Of Genoa dan Bank of barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karena bangsa Inggris yang begitu aktif dalam mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun dibawah ke negara jajahannya.

c) Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi 2014, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h.28

Secara kelembagaan bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic window* ini, Bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabanya melalui produk-produk yang bebas dari usaha riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.¹⁵

a. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan

Secara umum dunia perbankan yang ada di Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian, baik perkara maupun pelaksanaannya dalam menjalankan fungsinya sebagai perbankan. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan hidup rakyat banyak.¹⁶

Perbankan Indonesia, baik bank syariah maupun bank konvensional, memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem

¹⁵ Khotibul Umam. *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: rajawali pers 2016), h.27

¹⁶ Pasal 2, 3 dan 4 UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, *produk pendanaan bank syariah*, h 10

keuangan sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Secara spesifik fungsi perbankan di Indonesia adalah sebagai:¹⁷

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana.
 2. Pelaksanaan kebijakan moneter.
 3. Lembaga yang ikut berperan dalam bentuk pertumbuhan ekonomiserta pemerataan pembangunan.
- b. Pembinaan dan pengawasan perbankan

Sebenarnya kita tidak merujuk pada awal didirikannya perbankan syariah, perbankan syariah lahir karena adanya tuntutan dari masyarakat Islam yang benar-benar merupakan ajaran Islam. Adanya larangan-larangan praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur perjudian (*maisir*), ketidak jelasan dan manipulative (*gharar*) dan praktek melipat gandakan keuntungan secara tidak wajar (*riba*) menjadi salah satu alasan semakin banyaknya masyarakat yang percaya dengan kehadiran perbankan syariah.

Namun, sejalan dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (OJK), maka lingkup pengetahuan dan pengawasan perbankan, yang mencakup pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, sekarang merupakan tugas dan wewenang OJK. Tugas dan wewenang pengawasan dan pengaturan oleh OJK sering disebut dengan istilah *microprudential*. Sementara itu, tugas dan wewenang

¹⁷ <http://ojk.go.id/pengaturan-pengawasan-bank>

pengaturan dan wawasan yang dilakukan oleh BI disebut dengan istilah makroprudensial.¹⁸ Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK berkoordinasi dengan BI untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada perbankan.¹⁹ Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, BI memiliki 5 (lima) peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain, melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Sebagai contoh untuk menciptakan kestabilan moneter, bank indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.
2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, kusus perbankan yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi yang efektif ditegakkan. Disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakkan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Upaya penegakkan hukum dimaksud untuk melindungi perbankan dan *stakeholder* sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Sebagai contoh, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi basel II.
3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia menggambarkan

¹⁸ Bank indonesia, *bookletperbankan indonesia*, 2013, h. 83

¹⁹ Otoritas jasa keuangan: *booklet perbankan indonesia*, edisi 1, (maret 2014), h.19

mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas di sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki fungsi dan keahlian untuk mengidentifikasi resiko potensial dalam sistem pembayaran.

4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui peraturan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Hasil riset dan penentuan BI selanjutnya akan menjadi rekomendasi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistematis. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer, namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Oleh karena itu, pertimbangan resiko

sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Perbedaan kebijakan *makroprudensial* dan *mikroprudensial* terletak dari tujuannya dimana kebijakan *makroprudensial* ditujukan untuk memitigasi risiko sistemik (*limit system-wide distress*), sementara *mikroprudensial* ditujukan untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat (*limit individual institution' distress*). Dengan demikian, kebijakan *makroprudensial* lebih menitik beratkan pada upaya untuk menciptakan kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan, sementara kebijakan keuangan yang sehat, efisien dan mampu melakukan intermediasi dengan baik²⁰

3. Dual Banking System dan Dual System Bank

Dalam sistem perbankan Indonesia diakui dua sistem perbankan (*dual banking system*), yaitu bank syariah dan bank konvensional. Eksperimen dual banking system di Indonesia secara *de facto* muncul sejak tahun 1992, namun secara *de jure* diatur dalam undang-undang yaitu tahun 1998 dengan lahirnya UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan.²¹

Penegasan *dual banking system* (sistem perbankan ganda) ini juga ditemukan dalam UU perbankan syariah. Dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ditegaskan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia diadopsi adanya bank syariah pada satu sistem dan bank konvensional pada sistem yang

²⁰ Bank Indonesia, *booklet perbankan Indonesia*, h.85

²¹ Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3 UU perbankan). yang dikutip oleh Sulaiman Jajuli, *produk pendanaan bank syariah*, h.22

lain. Dengan kata lain, apabila bank tersebut melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, maka dinamakan bank syariah, sedangkan berdasarkan prinsip konvensional, dinamakan bank konvensional.²²

Apabila dibandingkan antara bank konvensional dan bank syariah, dari segi kelembagaan kegiatan usaha secara umum memiliki kesamaan, namun yang membedakan secara signifikan antara keduanya adalah dalam cara dan proses melakukan usahanya, yaitu yang pertama dilakukan berdasarkan prinsip syariah²³

Bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia memiliki positioning yang khas dengan moto sebagai “lebih dari sekedar bank” (*beyond banking*), yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi. Dalam *positioning* demikian, dimasa-masa mendatang diharapkan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk menabung di bank syariah. Apabila hal tersebut terjadi, maka pada gilirannya akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional dalam rangka *dual banking sistem* sebagaimana arsitektur perbankan Indonesia *Master Plan* Otoritas Jasa Keuangan.

Prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank syariah menurut UUPS adalah prinsip syariah yang telah difatwakan (DSN-MUI) dan selanjutnya telah dituangkan dalam peraturan bank Indonesia (PBI). Prinsip ini sebagai prinsip syariah perbankan dan telah menjadi hukum positif karena adanya

²² Pasal 1 butir dan 7 UU No.21 tahun 2018 tentang perbankan syariah. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, *produk pendanaan bank syariah*, h 22

²³ Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, *produk pendanaan bank syariah*, h.24

penunjukan oleh UUPS sebagai suatu yang wajib dilaksanakan perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat antara bank syariah dan nasabah menjadi bantal demi hukum (*null and void*)²⁴

Pada tahun 2008, sebagai amanat dari Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bentuk suatu komite dalam internal bank Indonesia untuk menindak lanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu pembentukan komite perbankan syariah (PBI No. 21 PBI/2008 tanggal 20 november 2008).²⁵ Tugas komite perbankan syariah adalah membantu bank indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI kedalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah. Selanjutnya, pada tanggal 11 November 2014, OJK menandatangani nota kesepahaman dengan DSN MUI di mana disepakati bahwa OJK bertindak selaku pengatur dan pengawas industri keuangan syariah, adapun DSN MUI bertindak selaku penyusun standar syariah dalam rangka penyusunan peraturan terkait jasa keuangan, pembinaan dan dewan pengawas syariah serta edukasi dan program komunikasi sektor jasa keuangan syariah.²⁶

Pada awal tahun 2016, pemerintah membentuk komite nasional keuangan syariah (KNKS) yang dipimpin oleh presiden. Komite ini melibatkan beberapa lembaga, antara lain OJK, BI, LPS, Bapenas, MUI, dan sejumlah kementerian, seperti kementerian keuangan, kementerian agama, kementerian BUMN, kementerian

²⁴Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: kencana prenatal media group 2014), h.2-3

²⁵ Andi soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah* (jakarta november 2016), h.57

²⁶ Andi soemitra, *bank dan lembaga keuangan*, h.58

koperasi dan UKM. Keberadaannya didasarkan pada peraturan presiden. Tujuan komite ini untuk harmonisasi perundang-undangan, menyusun literasi keuangan syariah, dan mendorong perekonomian nasional.²⁷

4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki kesamaan, terutama sistem transaksi penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, sistem-sistem utama memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang di biayai, dan lingkungan kerja.

Dalam sistem perbankan konvensional kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*).²⁸ Tujuan utama masyarakat menyimpan dana di bank adalah keamanan atas uang, investasi dengan harapan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

a. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum

²⁷ Andi soemitra, *bank dan lembaga keuangan*, h.58

²⁸ Kasmir. *dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), h.3

itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiamah* nanti.²⁹

b. Lembaga penyelesaian sengketa

Berdasarkan dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat selisih antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama badan *arbitrase muamalah* Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh kerajaan agung Republik Indonesia dan majelis ulama Indonesia.³⁰

5. Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komunikasi dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan pengawas syariah biasanya dilakukan pada posisi setingkat dewan komisariat dan setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh setiap dewan pengawasan syariah. Karena itu, biasanya

²⁹Afzalu rahman, *ekonomik doctrines oof islam*, Jilid II, di terjemahkan oleh soeroyo dan nastagin (Lahore: Islamic Piblication, 1990), h.362

³⁰Iman Jauhari, *penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut hukum Islam*, (Yogyakarta: Dcepublish, 2017), h.123

penetapan anggota dewan pengawasan syariah dilakukan rapat umum pemegang saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.³¹

6. Produk-Produk Bank Syariah

Pada sistem oprasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Produk penyaluran dana
- b. Produk penghimpunan dana
- c. Produk jasa

Produk-produk tersebut ditawarkan bank kepada nasabahnya. dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Penyaluran dana

- d) Prinsip jual beli (Ba'i)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disesuaikan di depan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsuntif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

³¹ Muhammad Syafii antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.30

- a) *A'I al-murabaha* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam bi'al-murabahah, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- b) *Ba'i as-salam* adalah jual beli nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai dengan harga yang di pesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran di lakukan dengan segera.
- c) *Ba'I al-istishna* merupakan bagian dari *ba'i as-salam* namun *Ba'I al-istishna* bisa digunakan dalam bidang manufaktur seluruh ketentuan *ba'I al-istishna* mengikut *ba'I as-salam* namun pembayaran dapat di lakukan beberapa kali pembayaran.³²

. Prinsip sewa (ijarah)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang di tetapkan secara pasti sebelumnya.

c. Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Dalam prinsip ini terdapat dua macam produk, yaitu:

³²Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec. *Bank Syariah*, edisi 1 – cet. 1 –jakarta gema insane press 200 1), h 101-113.

- a) Musyarakah: adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki maupun itu dana, skil, ataupun asset-aset lainnya. yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang di tentukan pelaksana proyek.
- b) Mudharabah: kerjasama dua orang atau sejumlah modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan perbedaan yang mendasar antara musyarakah dan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal dapat dimiliki satu orang saja.³³

2) Penghimpun dana

Produk penghimpun dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang diterapkan pada bank syariah adalah:

a. Prinsip wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan

³³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*-ed. 1-1- (Jakarta: Rajawali Perss , 2014), h.30.

wadiah amanah, dimana pihak yang dititip (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada *wadiah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang di titip.

b. Prinsip *mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau depositan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang di simpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.³⁴

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi dua bagian:

1. *Mudharabah mutlaqah*: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dan yang telah terhimpun.
2. *Mudharabah muqayyadah*: jenis ini adalah simpanan khusus dan

³⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Ed. 2.- Cet, 1.- Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. .87.

3. Pemilik dapat menerapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau akad tertentu.

3) Produk jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung (intermediaries) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain:

- a. Sharf (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

- b. Ijarah (sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwa bank syariah khususnya di Indonesia masih dalam proses perkembangan. Beberapa hal mendasar dari perkembangan tersebut adalah dukungan berupa perangkat-perangkat hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebagai patokan dalam

operasional perbankan syariah. Selain itu, warga Negara Indonesia yang mayoritas pendukungnya beragama Islam menjadi peluang yang besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan prinsip (hukum) yang dianut oleh sistem perbankan syariah, antara lain.

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya jelas tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagai keuntungan dan hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas, karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur *gharar* (ketidak pastian/spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras, misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan Syariah.

7. Produk jasa Bank Syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain³⁵:

- a. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.
- c. Deposito adalah investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
- d. Giro adalah simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
- e. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang

³⁵KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA.,*Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 22-24.

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.

- f. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:

Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

- 1) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
- 2) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna* ;
- 3) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*,; dan
- 4) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

- g. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang di serahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan /atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah penerima Fasilitas.

- h. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad dan Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

8. Kegiatan Perbankan Syariah

Kegiatan perbankan syariah, dalam UU no 21/2008 telah diatur sesuai dengan klasifikasi masing-masing jenis bank, yaitu sebagai berikut³⁶:

a. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarakan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli

³⁶KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA.,*Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 24-28.

dalam bentuk *ijarah nuntahiya bittamlik* atau Akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah;

- 7) Melakukan pengambilalihan uang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
- 10) Membeli dan menjual surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan /atau Bank Indonesia;
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Melakukan penitipan atau kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 15) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *waqalah*;

- 16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan usaha UUS meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *waqalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamluk* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
9. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;
14. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah ; dan

15. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Umum Syariah dapat pula³⁷:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan;
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;

³⁷KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA.,*Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 29-30.

- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana di maksud UUS dapat pula³⁸:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- 4) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 5) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- 6) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

c. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

³⁸KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA.,*Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 30.

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadiah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 - b. Invensi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah³⁹;
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b. Pembiayaan berdasarkan Akad *mudharabah*, *salam*, atau *istishna*;
 - c. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - e. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

³⁹KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA.,*Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h.31.

4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Bank Islam atau yang lebih di kenal dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, Bank Islam atau juga dapat di sebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya di kembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiaannya di sesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil atau imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang telah di sepakati. Konsep dasar bank Syariah di dasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Semua produk dan jasa yang di tawarkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak

membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang di terima oleh bank syariah maupun yang di bayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana dalam syariat Islam.

Undang-undang Perbankan Syariah NO. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁴⁰

Menurut Metwally dalam Martina bahwa bank syariah sendiri bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melaksanakan semua kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai sistem dengan prinsip prinsip syariah.⁴¹

9. Ekonomi Masyarakat

Sebelum melangkah lebih jauh penulis akan menjelaskan apa itu ekonomi, Ekonomi adalah pilihan ilmu-ilmu yang menjelaskan pilihan yang kita buat dan bagai mana pilihan-pilihan dapat merubah untuk mengatasi kelangkaan.

Istilan ekonomi itu lahir di yunani (Greek), dan dengan sendirinya istilah ekonomi itupun berasal dari kata-kata bahasa Yunani pula. Asal katanya adalah

⁴⁰Undang-Undang Syariah no. 21 tahun 2008

⁴¹ Martina. *Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah*. Watampone: STAIN Watampone, 2017.

Oikos Nomos. Orang-orang barat menerjemahkan dengan *Management of housebold or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan).⁴²

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesetaraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan pendapatan setiap tahun.

Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa di barengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan akan menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

b. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi permintaan agregad (AD) atau sisi penawaran agregad (AS), perekonomian Indonesia secara mengejutkan berhasil pulih dengan cepat dari kekacauan yang terjadi pada paruh pertama DKD 1960an, yaitu mencapai pertumbuhan dua digit untuk pertama kalinya pada tahun 1968. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat, paling sedikit 5% per tahun, tetap dipertahankan hingga tahun 1982, yaitu ketika melemahnya

⁴²Dr. tulus t.h tambunan, *Perekonomian Indonesia, (Perbis Ghalia Imdonesia)* September 2003, h 39-140.

pasar minyak bumi dunia menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun drastis. Di akhir dekade tersebut perekonomian Indonesia telah pulih kembali dan tingkat pertumbuhan sebesar 6-7 persen kembali berhasil dicapai, tidak terlalu jauh bedanya di bandingkan pertumbuhan yang tinggi pada periode kejayaan minyak bumi.⁴³

c. Teori pertumbuhan ekonomi daerah

1) Teori basis ekonomi

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi di sektor atau industri di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi (SPD) lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku output-nya diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut.

2) Teori lokasi

Teori lokasi biasanya juga digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu daerah. Inti pemikiran dari teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya yang serendah mungkin.⁴⁴ Oleh karena itu pengusaha akan memilih lokasi usaha yang

⁴³Hilil, Hal. *Ekonomi Indonesia*, (-Ed.2, Cet 2.-) Jakarta; Pt Rajagrafindo Persada, 2002. h.17.

⁴⁴Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Perbit Ghalia Indonesia). September 2003 h 39-182.

memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi biaya usaha/ produksinya, yakni lokasi yang lebih dekat dengan tempat bahan baku dan pasat.

3) Teori daya tarik industri

Dalam pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering dipertanyakan, jenis-jenis industri. Pada sejumlah faktor pembangunan industri di suatu daerah, yang terdiri dari berapa faktor-faktor daya tarik dan faktor-faktor daya saing daerah.

10. Ciri-Ciri Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Ciri-ciri pengembangan ekonomi masyarakat menurut Elly Irawan adalah sebagai berikut:

Mempunyai tujuan yang hendak dicapai

- a) Mempunyai wadah yang terorganisir
- b) Aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut, serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setempat
- c) Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait
- d) Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap pembangunan atau pemberdayaan.
- e) Menekankan pada sikap partisipasi masyarakat dalam ekonomi terutama dalam wirausaha.

- f) Ada keharusan membantu lapisan masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bahwa, jika tidak maka solidaritas dan kerja sama sulit tercapai.⁴⁵

11. Bentuk-Bentuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Bentuk-bentuk pengembangan masyarakat setidaknya menyangkut tiga bidang pengembangan yaitu:

- a) Pengembangan asset manusia (*human asset*)

Pengembangan ini berkaitan erat dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Michael Sheraden, *human asset* ini termasuk dalam golongan asset yang tidak nyata. *Human asset* secara umum meliputi intelegensi, latar belakang pendidikan, pengetahuan, ide dan lain sebagainya.

Dalam teori sumber daya manusia, peningkatan SDM dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesetabilan sosial. Perbaikan mutu sumber daya manusia (SDM) akan meningkatkan inisiatif dan sikap-sikap kewiraswastaan yang pada akhirnya membutuhkan investasi dan lapangan kerja yang baru. Investasi tidak hanya diarahkan pada peningkatan *Physical Capital Stock* tetapi juga di arahkan pada *Human Capital Stock* .Modal dalam Teori Sumber Daya Manusia (SDM) bukan dipandang sebagai syarat utama untuk menciptakan pertumbuhan.

⁴⁵ Alvi shidqi. *Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Bukittinggi*, (Jakarta;2008).

Usaha- usaha untuk meningkatkan *human asset* biasanya dilakukan dalam berbagai program yang bersifat kualitatif seperti:

1. Program Pelatihan dan keterampilan dalam bentuk kursus-kursus.
2. Program Penyuluhan dan kesemuanya bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya menghasilkan output peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

b) Pengembangan Aset Modal (*Financial Asset*)

Pengembangan meliputi modal produksi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin produksi dan alat-alat/komponen produksi nyata lainnya. Salah satu masalah klasik yang di hadapi para pelaku perekonomian kecil baik yang bergerak dalam bidang produksi, distribusi, perdagangan, maupun jasa adalah sulitnya mendapatkan modal khususnya kredit usaha. Ketidak mampuan dan ketidak siapan mereka dalam memenuhi setiap syarat yang di ajukan oleh lembaga formal seperti bank menjadikan sulitnya usaha terealisasikan. Para perusahaan kecil pada umumnya tidak memiliki aset yang cukup untuk dijaminkan kepada bank. permasalahan tersebut sebenarnya dapat dipecahkan dengan cara pengusaha tersebut bergabung dengan sebuah organisasi, wadah usaha dengan bersama dalam pembiayaan dimana dana tersebut dihasilkan dari modal bersama. Wadah tersebut dapat berupa koperasi simpan pinjam, Kelompok keswadayaan Masyarakat (SDM), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan lain sebagainya. Dengan adanya lembaga keuangan yang dibangun secara bersama tersebut diharapkan permasalahan pendanaan usaha

akan dapat teratasi, menghindarkan pinjaman dari rentenir yang pada akhirnya turut adil dalam ketidak berkembangannya aset.

Keberadaan lembaga keuangan yang dibentuk secara bersama ini diharapkan menjadi kunci bagi permasalahan keterbatasan akses permodalan yang selanjutnya akan mempengaruhi pada peningkatan produksi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain bertambahnya aset produksi, pendapatan dan kesejahteraan secara umum.

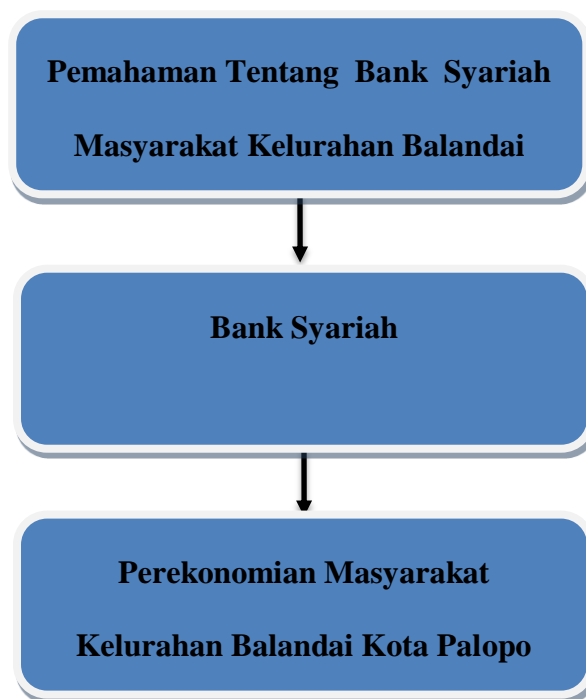
c) Pengembangan Aset Sosial (*Sosial Aset*)

Aset sosial menurut Michael Sheraden meliputi keluarga, teman, koneksi, atau jaringan sosial dalam bentuk dukungan material, dukungan emosional informasi, dan akses lebih mudah pada pekerjaan, kredit, bantuan-bantuan, dan tipe aset lainnya. Modal sosial ini menurut Mark Gronovetler dan James Coleman secara potensial sangat penting dalam menciptakan aktifitas sosial dan ekonomi individu masyarakat.

Aset sosial menurut Edi Soeharto berkontribusi bagi kehidupan , terbuka aset sosial berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga/kelompok masyarakat tertentu. Orang yang terikat dalam menghadapi kesulitan, kegembiraan, dan lain-lain. Oleh karena itu, suatu komunitas yang mewarisi berbagai jaringan dan perkumpulan biasanya lebih baik dalam mengantaskan kemiskinan, kerentanan, memecahkan masalah/perselisihan, dan mengambil manfaat dari peluang-peluang baru.

d. Kerangka pikir

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini seperti yang diungkapkan pada latar belakang penelitian berkaitan dengan peran perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kerangka pikir di bawah ini memberikan gambaran alur penelitian tentang pemahaman masyarakat mengenai bank syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Studi Kasus kelurahan Balandai Kota Palopo). Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir dalam penelitian ini di gambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskripsi yaitu pengumpulan, menyusun data mendeskripsikan berbagai dokumen data informasi yang aktual. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan pada penelitian ini.

Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dimaksudkan untuk menyelidiki apakah konsep yang di berikan sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain kearah perubahan masyarakat, pendekatan ini dipergunakan untuk menjelaskan dinamika masyarakat dalam merespon keberadaan perbankan dan sisteme konomi Islam.⁴⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Balandai Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Karena peneliti menemukan masalah terkait pemahaman tentang bank syariah. Selain itu, lokasi penelitian juga mudah dijangkau.

⁴⁶ Muhammad Fajar, *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tomoni Tentang Produk Tabungan BNI Syariah KCPTomoni* (Skripsi IAIN Palopo, 2016). h. 33.

C. Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan Balandai
2. Masyarakat Kelurahan Balandai
3. Pelaku Usaha Masyarakat Kelurahan Balandai

D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap objek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui observasi dari hasil wawancara langsung terhadap informan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia serta informasi lainnya yang ada kaitannya dengan bank syariah dan ekonomi masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas.⁴⁷

Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

⁴⁷CholidNurbokodan H, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Cet 12), (Jakarta, PT BumuAksara, 2012).h 70.

Pengamatan adalah alat yang pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Metode ini dipergunakan sebagai salah satu cara dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung pada objek penelitian

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*), yaitu pengambilan data dengan cara melakukan percakapan antara narasumber dan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang eksistensi perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data berupa uraian melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R.D* (Cet 18, Bandung Alfabeta, 2013), h. 143.

2. Analisis data

Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis secara deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan observasi kemudian data tersebut di paparkan, di bahas dan di simpulkan.

Data yang telah di oleh secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a) Induktif, yaitu suatu metode yang titik tolak pada uraian yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b) Deduktif, salah satu metode yang berangkat dari uraian yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c) Teknik komparatif, yaitu tehnik analisis perbandingan dari data dan fakta dari ke dua tehnik tersebut di atas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15" - 3°04'08" Lintang selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur timur. Kota palopo yang merupakan daerah otonomi kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu, dimana disebelah utara berbantasan dengan kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, disebelah timur dengan Teluk Bone, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sedangkan di sebelah barat dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja. Posisi strategis ini memberikan keuntungan sekaligus memberikan kerugian secara ekonomis karena menerima beban dari arus lalu lintas yang ada.⁴⁹

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Kota Palopo terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan data rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Dari luas Kota

⁴⁹Badan Pusat Statistik, *Refleksi 10 tahun Kota Palopo* 2012

Palopo sekitar 62,00 persen dari dataran rendah dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut, 24,00 persenter letak pada ketinggian 501-1000 meter dan sekitar 14,00 persen terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 meter.⁵⁰

a. Status Kelurahan

Dimekarkan pada bulan Mei tahun 2006 dengan nama Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo, status tanah hak milik dan sudah merupakan bangunan sendiri.

b. Letak Geografis

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Temmalebba kecamatan Bara.

2) Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.

3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Salubulo Kecamatan Wara Utara.

4) Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Battang kecamatan Warabarat.

c. Keadaan Wilayah dan Penduduk

Balandai memiliki luas Wilayah 5,6 km² terdiri dari daratan, pegunungan dan pantai. Kelurahan balandai memiliki 4 RW dan 17 RT. Keadaan

⁵⁰Badan Pusat Statistik, *Kota Palopo Dalam Angka 2016*, h. 35-42

penduduk \pm 5.970 jiwa, \pm 1.388 kk, jumlah laki-laki sebanyak 2.914 jiwa dan perempuan 3.056 jiwa. Jarak dari ibu kota kab/kota \pm 4 km. jarak dari ibu kota provinsi \pm 368 km..

d. Visi Misi Balandai

1) Visi

“terwujudnya pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan damai”

2) Misi

- a. Mengembangkan kualitas SDM seputar dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat.
- b. Menciptakan kondisi yang aman dan kondusif untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
- c. Membangun kesadaran beragama dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- d. Mengedepankan norma dan budaya lokal dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
- e. Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan dan pengayoman kepada masyarakat serta mempertahankan budaya gotong royong.

2. Hasil Temuan Lapangan

a. Pemahaman Masyarakat Tentang Bank Syariah Di Kelurahan Balandai Kota Palopo.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Kota Palopo semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah bank syariah yang ada di Kota Palopo. Diantaranya yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Syariah (BRIS), BNI Syariah dan lain sebagainya. Kehadiran Bank syariah di Kota Palopo merupakan salah satu kebutuhan masyarakat Kota Palopo yang mayoritas beragama Islam. Kelurahan balandai sebagai salah satu daerah yang mayoritas jumlah penduduknya beragama Islam semakin menyadari bahwa bank syariah merupakan solusi terhadap riba. Hal tersebut juga disadari salah satu masyarakat kelurahan Balandai yang mengatakan bahwa:

“saya sudah tahu tentang bank syariah dari dulu. Saya sudah pernah pake bank syariah karena saya tahu bank syariah tidak pake bunga atau riba”⁵¹

Dari wawancara dilakukan dengan salah satu masyarakat Balandai, dapat diketahui bahwa bank syariah telah diketahui di kelurahan Balandai. Salah satu unsur penting yang dapat mendukung eksistensi Bank Syariah di Kelurahan Balandai yaitu melalui sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat di Kelurahan Balandai ada yang

⁵¹Syarifuddin Wahab, Masyarakat Balandai, *Wawancara* dilakukan pada tanggal 26 Juni 2019.

telah mengetahui tentang bank syariah namun ada pula yang sama sekali tidak mengetahui tentang bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan yang disampaikan oleh Iqbal Hasyim selaku ketua RT yang mengatakan bahwa:

“saya rasa masyarakat Balandai banyak yang tidak tahu tentang bank syariah. Saya pernah dengar bank syariah tapi saya tidak tahu banyak tentang itu. Bank syariah juga tidak pernah melakukan sosialisasi di daerah kami”⁵²

Seperti yang di ungkapkan oleh ketua RT 03 Kelurahan Balandai bahwa bank syariah tidak pernah melakukan sosialisasi di masyarakat Balandai Kota Palopo. Mereka hanya mengetahui tentang bank syariah melalui perbincangan orang lain. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa eksistensi bank syariah di kelurahan Balandai belum diketahui secara merata oleh masyarakat kelurahan Balandai. Sebagian dari masyarakat hanya mengenal bank syariah tetapi tidak memahami konsep dan sistem pelaksanaan bank syariah. Sehingga, minat menggunakan jasa bank syariah di kelurahan Balandai Kota Palopo sangat rendah. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Yuliana, ia menegaskan:

“selama ini saya menabung di bank ji. Tidak ku tahu ada pale namanya bank syariah sama bank konvensional. Yang ku tahu bank ji tempatnya menabung sama pinjam uang”⁵³

⁵²Iqbal Hasyim. Ketua RT 3 Balandai Kota Palopo. *Wawancara*. Dilakukan pada tanggal 27 Juni 2019

⁵³Yuliana, Pelaku Usaha. *Wawancara* di lakukan pada tanggal 27 Juni 2019

eksistensi bank syariah yang ada di kota palopo belum bias dikatakan sudah sepenuhnya baik karena sebagian besar masyarakat Kota Palopo khususnya Kelurahan Balandai belum mengetahui kehadiran bank syariah. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurang maksimalnya pihak bank syariah dalam melakukan sosialisasi di berbagai kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Palopo.

Sosialisasi pihak Bank Syariah terhadap masyarakat di Kelurahan Balandai dianggap kurang bahkan masyarakat Kelurahan Balandai tidak pernah mengetahui hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya masyarakat kelurahan Balandai yang masih-masing dan tidak tahu tentang eksistensi atau keberadaan bank syariah di Kota Palopo. Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat di Kelurahan Balandai menjelaskan bahwa :

“saya mengetahui tentang bank syariah melalui dunia pendidikan. Saya belajar tentang bank syariah di kampus. Tetapi sebelum saya mengambil jurusan perbankan syariah, saya tidak mengetahui tentang bank syariah.”⁵⁴

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa eksistensi bank syariah di Kelurahan Balandai sebagian besar hanya diketahui kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan. Bagi masyarakat awam sangat asing dengan istilah bank syariah yang telah berkembang di Kota Palopo. Pada umumnya, masyarakat

⁵⁴Nirwana. Masyarakat. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 28 Juni 2019

Kelurahan Balandai kurang mengetahui tentang bank syariah karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan. Menngingat, bank lembaga keuangan yang ada di Kota Palopo semakin banyak sehingga menjadi catatan besar bagi pihak bank syariah untuk masuk dan hadir di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank syariah di Kota Palopo agar dikenal dan diketahui oleh masyarakat Kota Palopo pada umumnya dan masyarakat Balandai pada khususnya yaitu melalui sebuah sosialisasi di berbagai wilayah yang ada di Kota Palopo. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat terkait sistem, mekanisme, dasar hukum dan sebagainya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa bank syariah.

b. Pemahaman Masyarakat tentang Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balandai Kota Palopo

Pengembangan usaha di Kelurahan Balandai memiliki banyak tantangan. tantangan yang dihadapi seperti kekurangan modal, tenaga kerja yang kurang ahli atau terampil dan sebagainya. Salah satu faktor pendukung yang dapat membantu perkembangan usaha masyarakat Kelurahan Balandai yaitu melalui peran dan kontribusi lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman melalui kredit atau

pembiayaan. Pengembangan usaha bukan saja membutuhkan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga harus dibarengi dengan suplay modal yang memadai. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Kota Palopo diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan usaha masyarakat Kelurahan Balandai. Salah satu kontribusi yang dapat dilakukan bank syariah yaitu melalui pemberian pembiayaan kepada masyarakat Kelurahan Balandai yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ira mengatakan bahwa: “saya lebih suka menggunakan bank konvensional daripada bank syariah dalam menjalankan usahaku. Karena kalau bank syariah lama prosesnya baru kayak na persulitki.”⁵⁵

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pelaku usaha yang ada di Kelurahan Balandai cenderung menggunakan bank konvensional dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut disebabkan karena asumsi masyarakat bahwa sistem pelayanan yang diterapkan bank syariah membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan bank konvensional. Selain itu, pelayanan bank syariah dianggap berbelit-belit sehingga mempersulit para pelaku usaha. Dengan adanya asumsi demikian, masyarakat Kelurahan Balandai lebih memilih

⁵⁵Ira, Pelaku Usaha. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 29 Juni 2019

menggunakan jasa bank konvensional dibandingkan bank syariah. Namun, Berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh Bahar yang mengatakan bahwa:

“saya ada tabungan di bank syariah. Tapi kalau untuk ambil modal saya pinjam di bank umum bukan bank syariah. Karena dari dulu saya pake bank umum kalau ambil modal. Kalau bank syariah baru-baru ini saya pake itu pun saya pake ini menabung”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pelaku usaha yang ada di Kelurahan Balandai cenderung menggunakan jasa bank syariah bukan untuk keperluan usaha melainkan untuk menabung atau menyimpan dana. Hal ini disebabkan karena kebiasaan mengambil pinjaman modal telah dilakukan di bank konvensional sejak lama. Sehingga menyebabkan mereka nyaman dan mudah mengambil kredit di bank konvensional dibandingkan bank syariah. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi bank syariah untuk membuat masyarakat Kelurahan Balandai mengenal sekaligus nyaman dengan merek bank syariah mengingat bank konvensional telah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Kelurahan Balandai.

Sejauh ini, menurut pelaku usaha yang ada di Kelurahan Balandai, Bank syariah belum memiliki kepercayaan dari wirausaha yang ada di Kelurahan Balandai.

⁵⁶Bahar. Pelaku Usaha. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 29 Juni 2019

Sehingga menyebabkan mereka masih ragu menggunakan jasa bank syariah dalam proses pengembangan usaha. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya, eksistensi bank syariah di kalangan pelaku usaha maupun wirausaha yang ada di Kelurahan Balandai masih dianggap kurang memberikan kontribusi. Salah satu penyebabnya yaitu sistem yang ada di bank syariah masih kurang dipahami oleh masyarakat Kelurahan Balandai. Berkembang atau tidaknya usaha yang ada di Kelurahan Balandai tidak serta merata di titik pada kontribusi bank syariah, melainkan juga pada individu atau wirausaha itu sendiri. Dalam melakukan pengembangan usaha, wirausaha atau pelaku usaha Kelurahan Balandai dituntut juga melakukan dan mengambil keputusan sendiri terhadap apa yang akan dilakukan untuk pengembangan usaha, termasuk pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa layanan bank syariah atau jasa bank konvensional.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan bank syariah dalam menindak lanjuti asumsi masyarakat kelurahan Balandai pada umumnya dan pelaku usaha Kelurahan Balandai pada khususnya yaitu senantiasa melakukan inovasi terutama inovasi yang dapat membantu wirausaha ataupun masyarakat dalam meningkatkan perekonomian inovasi yang dapat dilakukan bank syariah melalui inovasi produk berupa pemberian modal kepada pelaku usaha atau masyarakat dalam pengembangan usaha. Inovasi

produk tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan produk yang ditawarkan bank konvensional. Selain inovasi produk, bank syariah juga harus melakukan inovasi terhadap sistem pelayanan dalam menarik minat masyarakat. inovasi tersebut diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat pada umumnya terkait sistem bank syariah yang terkesan lambat dan mempersulit masyarakat dalam bertransaksi di bank syariah.

Secara umum, bank syariah telah melaksanakan dan memfasilitasi para pelaku usaha atau wirausaha. Salah satu diantaranya yaitu memfasilitasi dunia usaha melalui produk yang ditawarkan. Hal ini dibuktikan dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Budi Gautama Siregar yang mengatakan bahwa dalam upaya pengembangan wirausaha yang ada, bank syariah menyediakan produk-produk untuk dimanfaatkan dalam pengembangan usaha.⁵⁷ Adapun kendala yang dihadapi bank syariah yaitu masih terdapat beberapa wirausaha yang tidak percaya dengan pelayanan bank syariah. Kebiasaan demikian hampir ditemukan di beberapa sudut atau wilayah yang ada di Kota Palopo.

⁵⁷Budi Gautama Siregar. *Peranan Bank Syariah dalam Pengembangan Kewirausahaan*. Dalam Jurnal At-Tijarah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015, h. 15

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Eksistensi Perbankan Syariah dalam Industri Keuangan Indonesia

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan vital dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada peristiwa krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada saat itu sangat memprihatinkan perekonomian nasional. Akan tetapi, eksistensi perbankan syariah mampu menjadi penopang perekonomian nasional. Bank syariah mampu bertahan di tengah pergolakan krisis perekonomian yang ada. Bank syariah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian melalui pemberian pembiayaan kepada masyarakat sehingga bank syariah menjadi mitra dengan masyarakat.⁵⁸

Bank syariah mampu bertahan dengan kondisi perekonomian yang kurang stabil disebabkan karena bank syariah bergerak di sektor riil atau bergerak dalam usaha kecil dan menengah sehingga tidak terlalu mempengaruhi kondisi bank syariah meskipun kondisi ekonomi nasional kurang membaik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara mengatakan bahwa pembiayaan bank syariah yang di alokasikan untuk UMKM di Kota Makassar mengalami peningkatan

⁵⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (edisi pertama, September 2002), h. 15.

yang fluktuasi, namun kontribusi pembiayaan bank syariah belum optimal.⁵⁹ Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan perbankan syariah dalam hal ini alokasi pembiayaan sangat mendukung dalam meningkatkan atau mengembangkan perekonomian yang ada.

Seiring dengan perkembangan zaman, eksistensi perbankan syariah di Indonesia menjadi lembaga keuangan yang memberikan solusi terhadap perekonomian nasional. Hal ini tentunya menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam memberikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat signifikan. Kemajuan Bank Syariah di Indonesia beberapa abad terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menggembirakan.⁶⁰ Berdasarkan teori tersebut dapat dipahami bahwa eksistensi bank syariah di Indonesia pada dasarnya merupakan hal yang sangat menggembirakan karena mampu mengatasi permasalahan perekonomian bangsa Indonesia. Sehingga kehadiran bank syariah di tengah-tengah masyarakat sepatutnya mendapatkan respon yang positif dari berbagai kalangan masyarakat.

⁵⁹Muslimin Kara. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Kota Makassar*. Dalam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 47 Nomor 1 Juni Tahun 2013, h. 270

⁶⁰Nurhisam Luqman. *Kepatuhan Syariah dalam Industri Keuangan Syariah*. Dalam jurnal Hukum Ius QUIA Iustum Volume 23 Nomor 1 h. 78

2. Eksistensi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian

Perbankan syariah memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satu peranan penting bank syariah yaitu pemberian akses lembaga keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Layanan bank syariah harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akses ke bank syariah dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan atau pun memanfaatkan jasa lembaga keuangan bank untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti pemanfaatan pembiayaan untuk mengelola usaha. Hal tersebut sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Novia Nengsih yang mengatakan bahwa bank syariah mampu mengalokasikan pembiayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan.⁶¹

Peran perbankan syariah dalam perekonomian di Indonesia dianggap belum signifikan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kendala yang dihadapi bank syariah dalam perkembangannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan eksistensi bank syariah di Indonesia yaitu melalui peningkatan *market share* atau pangsa pasar bank syariah itu sendiri. Pangsa pasar merupakan suatu indikator yang

⁶¹Novia Nengsih. *Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusi di Indonesia*. Dalam jurnal Etikonomi Volume 14 Nomor 2 tahun 2015, h. 228

menggambarkan kondisi bank syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan melalui revitalisasi startegi peningkatan pangsa pasar.⁶²

Berikut ini beberapa solusi atau strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar bank syariah sehingga mampu memiliki kontribusi terhadap perekonomian:

a. Sumber Daya Insani

Permasalahan pokok di bank syariah yaitu masalah kualitas sumber daya insani. Menurut Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia mengatakan bahwa sekitar 60% sumberdaya insane yang ada di bank syariah berasal dari bank konvensional.⁶³ Berdasarkan hasil riset tersebut dapat dipahami bahwa salah satu factor penghambat perkembangan eksistensi bank syariah di Indonesia yaitu kondisi sumberdaya insani yang dimiliki yang tidak sesuai dengan latar belakang bidangnya. Sehingga hal demikian sangat berpengaruh terhadap poladan pengelolaan yang dilakukan. Kondisi sumber daya insan yang dimiliki bank syariah akan memberikan dampak terhadap mekanisme, sistem dan etos kerja bank syariah.

⁶²Safaah Restuning. *Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi ,Indonesia*. Dalam jurnal Indo Islamika, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014 h. 53

⁶³Said Sa'ad Marathon *.Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) h. 143

b. Peraturan

Eksistensi bank syariah di Indonesia padamulanya tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sehingga peraturan bank syariah tidak terlalu di perhatikan oleh kalangan pemerintah. Namun, eksistensi bank syariah semakin mendapat perhatian setelah peristiwa krisis moneter tahun 1998 yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Sehingga seiring dengan kemajuan, pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah. Sehingga dengan di keluarkannya aturan tersebut pangsa pasar bank syariah semakin meningkat dan seimbang dengan bank konvensional.⁶⁴

⁶⁴ NurRianto. *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011) h. 314

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang bank syariah di Kelurahan Balandai Kota Palopo masih kurang diketahui oleh masyarakat. karena pihak bank syariah kurang melakukan sosialisasi sehingga masyarakat kurang tahu dan paham tentang eksistensi Bank Syariah yang ada di Kota Palopo.
2. Bank Syariah di kalangan pelaku usaha maupun wirausaha yang ada di Kelurahan Balandai kurang memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat Kelurahan Balandai. Pelaku usaha cenderung menggunakan jasa bank konvensional dalam melakukan pengembangan usaha melalui pengambilan kredit atau pinjaman di bank konvensional.

B. Saran

1. Bagi Praktisi Bank Syariah, sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait produk yang ditawarkan di Bank Syariah.
2. Bagi masyarakat, sebaiknya menggunakan jasa bank syariah dalam melakukan aktivitas pengembangan perekonomian mengingat bank syariah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman ,Hafidz, *RaporMerah Bank SyariahKritikatas fatwa produk perbankansyariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016),
- Antonio, Muhammad Syafii, M.Ec. *Bank Syariah*, edisi 1, cet. 1 –Jakarta gema insane press 2001
- Arifin, Zainil, *Dasar-DasarManajemen Bank syariah*, (Diterbitkan OlehAlvbel-Anggota I kapi Komlek TNI-AU Triloka, JlTrilokal 1 No. 18, Pancoran, Jakarta;2002)
- Asy'arie,Musa *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet 1, (Yogyakarta: LESFI, 1997)
- Budi Gautama Siregar. *Peranan Bank Syariah dalam Pengembangan Kewirausahaan*. Dalam Jurnal At-Tijarah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015
- Bungu Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofi Dan Metodologi Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2005).
- Cholid Nurbokodan H, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*(Cet 12), (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2012)
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Depok: RAJAWALI PERS,2017)
- Fajar, Muhammad, *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tomoni Tentang Produk Tabungan BNI SyariahKCP Tomoni* (Skripsi IAIN Palopo, 2016)
- Hilil,Hal. *Ekonomi Indonesia*,(-Ed.2,Cet 2.-) Jakarta; Pt Rajagrafindo Persada, 2002
- Ikatan akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2002)

- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Ed. 2.- Cet, 1.- Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004)
- Karnaen perwataatmadja dan m. Syafe'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT danabakhti Wakaf, 1997)
- *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf, 1997)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (edisi pertama, September 2002)
- *Manajemen Dana bank Syariah*, UPP STIM Ikut Mencerdaskan Bangsa, edisi revisi Kedua maret 2011
- , *Manajemen Dana Bank Syariah*.
- , *Manajemen Bank Syariah*-ed. 1-1- (Jakarta: Rajawali Perss, 2014)
- Muslimin Kara. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Kota Makassar*. Dalam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 47 Nomor 1 Juni Tahun 2013
- Shidqi Alvi. *Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Bukittinggi*, (Jakarta; 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R.D* (Cet 18, Bandung Alfabeta, 2013)
- Tambunan, Tulus, *Perekonomian Indonesia, (Perbis Ghalia Indonesia)* September 2003
- *Indonesia*, (Perbit Ghalia Indonesia). September 2003
- Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017)
- , *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017)

RIWAYAT HIDUP



Rino, lahir di Lalong, Pada tanggal 01 Desember 1994. Anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda Yunus P., dan Ibunda Nurhayati. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di SDN Negeri 375 Lalong Selatan Kab. Luwu dan tamat pada tahun 2006.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Batusitanduk Kab. Luwu, dan tamat pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 Walenrang Kab. Luwu, dan tamat pada tahun 2012.

Pada tahun 2015 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum menyelesaikan akhir studi, penulis menyusun skripsi dengan judul ***“Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Balandai Kota Palopo”***, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).